RENCANA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA MAGELANG TAHUN 2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KOTA MAGELANG

TAHUN 2023

WALIKOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2022 NOMOR 90

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 90 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA MAGELANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa rencana kerja perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;

b. bahwa rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah telah dilakukan verifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk diselaraskan dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2023 dan rencana kerja perangkat daerah lainnya;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah yang telah diverifikasi kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2022 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2023.

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
(3) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
(4) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. Bab 1 : pendahuluan;
   b. Bab 2 : hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya;
   c. Bab 3 : tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
   d. Bab 4 : rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
   e. Bab 5 : penutup.

(2) Uraian Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 22 Juli 2022
WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang

pada tanggal 22 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2023

DAFTAR PAGU INDIKATIF RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	116.701.015.538,00
2	Dinas Kesehatan Kota Magelang	253.248.522.874,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang	33.084.723.651,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang	27.491.385.299,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang	12.833.222.685,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang	5.015.890.376,00
7	Dinas Sosial Kota Magelang	10.838.760.922,00
8	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	12.178.715.010,00
9	Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	26.068.495.135,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang	5.957.775.486,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Magelang	10.779.362.487,00
12	Dinas Perhubungan Kota Magelang	17.438.172.427,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang	11.543.724.980,00

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	5.459.016.738,00
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang	14.133.714.058,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang	5.835.364.546,00
17	Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang	9.317.670.659,00
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang	19.343.403.224,00
19	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang	30.025.324.802,00
20	Sekretariat Daerah Kota Magelang	41.955.050.115,00
21	Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	21.362.524.711,00
22	Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	21.867.971.591,00
23	Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	19.185.918.044,00
24	Inspektorat Kota Magelang	7.138.116.223,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kota Magelang	8.808.640.947,00
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	19.766.988.232,00
27	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Magelang	28.110.596.662,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang	7.482.873.810,00
	TOTAL	802.992.941.132,00

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang Tahun Anggaran 2023** telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang Tahun 2023, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang Tahun 2021 – 2026 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang 2021 – 2026. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dimana semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Penyusunan Renja Tahun 2023 merupakan kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah. Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh aparat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang Tahun 2023 memuat penjabaran program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun tersebut.

Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2023 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang.

Magelang , Juli 2022

Plt.KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA MAGELANG
Sekretaris

Syaifullah, S.Sos., Msi
Pembina Tk. I
NIP. 19680403 199503 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **iii**

DAFTAR TABEL ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II **9**

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH **9**

TAHUN LALU **9**

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 35

2.3.1 Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang 35

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang 36

2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional 37

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan 38

2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2023 38

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 39

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .. 53

BAB III **57**

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **57**

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 57

3.3 Program dan Kegiatan 64

BAB IV **76**

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **76**

BAB V **82**

PENUTUP **82**

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Pengkategorian Capaian Kinerja	10
Tabel 2.2	Faktor Penyebab Tidak Tercapai, Tercapai dan Capaian Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang Tahun 2021.....	14
Tabel 2.3	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra daerah sampai dengan Tahun 2022.....	16
Tabel 2.4	Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang.....	25
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang	27
Tabel 2.6	Masalah Pokok dan Akar Masalah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang.....	36
Tabel 2.7	Masalah dan Strategi Pemacahan Masalah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang.....	39
Tabel 2.8	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kota Magelang.....	41
Tabel 2.9	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kota Magelang.....	54
Tabel 3.1	Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang.....	58
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang.....	60
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan maju Tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang.....	65
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang Tahun 2023	77

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Renstra. Dokumen Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan memuat perencanaan tahunan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Renja. Renja merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh karena itu setiap Perangkat Daerah harus merumuskan Renja secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang Tahun 2023 disusun berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan sistematika penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang ini disusun dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja

pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2021 - 2026.

Penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang memuat program, kegiatan, alokasi dan kelompok saran dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan penyusunan berupa persiapan penyusunan Renja; persiapan Rancangan Awal Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang tahun lalu dan evaluasi hasil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang tahun berjalan; penyusunan Rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang ; pembahasan Rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang ; perumusan Rancangan Akhir Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang ; Verifikasi Rancangan Akhir Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang.

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang Tahun 2023 merupakan dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang untuk tahun Ke dua periode Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang Tahun 2021 – 2026 yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang Tahun 2023 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target Renstra dan RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan nasional. Selain itu, penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang tahun 2023, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang Tahun 2021 – 2026, Renja K/L dan Renja Provinsi Jawa Tengah. Renja harus selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan tersebut, utamanya yang berkaitan langsung dengan urusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang Tahun 2023 berdasarkan pada beberapa peraturan sebagai landasan atau rujukan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

18. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 ;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2009-2029;

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 ;
29. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011 - 2031;
30. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor Tahun 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang Tahun 2005 – 2025 ;
31. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021 – 2026 ;
32. Peraturan Walikota Magelang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja .

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang mengacu pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang dengan periode 5 (lima) tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus sebagai acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara umum dilingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Maksud disusunnya Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang 2023 adalah untuk dijadikan dasar serta acuan bagi Penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang adalah:

a. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun yang tersusun dalam rencana.

b. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang.

c. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;

d. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan sesuai dengan kewenangannya.

e. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika dokumen Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang tahun 2023 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang.

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang tahun lalu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun selanjutnya yakni Tahun 2023.

Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang Tahun 2023 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Dari hasil evaluasi Program pada Tahun 2021, ada beberapa Program yang direncanakan namun tidak dapat dilaksanakan karena mengalami rasionalisasi anggaran.

Pengkategorian kinerja menggunakan skala sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	X > 100
2	Baik	X = 100
3	Cukup	80 < X < 100
4	Kurang	50 ≤ X ≤ 80
5	Sangat Kurang	X < 50

Adapun Capaian program di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang tahun 2021, dari hasil evaluasi capaian program yang melebihi target yang telah direncanakan adalah sebagai berikut :

- Program Perencanaan dan pembangunan industri dengan indikator kinerja Persentase pertambahan jumlah industri kecil dan menengah tingkat capaian 584,80 %

Faktor yang mempengaruhi :

- Dengan membaiknya kondisi akibat pandemi (penrunan lavel PPKM) sehingga banyak industri kecil yang tumbuh atau melakukan proses produksi lagi
- Pendampingan dan monitoring yang terus dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Magelamng

- Pengendalian izin usaha industri kab/kota dengan indikator kinerja Persentase jumlah IKM yang memiliki legalitas usaha tingkat capaian 371%

Faktor yang mempengaruhi :

- Adanya pendampingan dan fasilitsi pengurusan perizinan usaha

➢ Program Pengelolaan sistem informasi industri nasional dengan indikator kinerja Ketersediaan informasi industri terkini dan lengkap tingkat capaian 125 %

Faktor yang mempengaruhi :

- Penambahan SDM dibidang industri yang mengelola dan mempersiapkan laporan / informasi terkait industri yang dibutuhkan pelaku usaha industri kecil

➢ Program Perizinan dan pendaftaran perusahaan (khusus gudang , tempat penjualan minuman beralkohol dan tempat penyimpanan bahan berbahaya) dengan indikator kinerja Faktor yang mempengaruhi :

- Terus dilakukannnya monitoring gudang / tempat penyimpanan bahan berbahaya dan mengingatkan kepada pengusaha apabila masa berlakunya telah habis untuk segeara melakukan perpanjangan izin

➢ Program Pengembangan ekspor dengan indikator kinerja nilai ekspor (US$) tingkat capaian 186,69%

Faktor yang mempengaruhi :

- Terus melakukan pembinaan kepada pelaku berpotensi ekspor
- Terus melakukan pemantauan secara periodik ekspor yang telah dilakukan.

➢ Program Standarisasi dan perlindungan konsumen dengan indikator kinerja Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda sah yang berlaku tingkat capaian 140,41%

Faktor yang mempengaruhi :

- Melakukan tera / tera ulang ditempat usaha
- Melakukan kerja sama dengan kelurahan untuk pelaksanaan tera / tera ulang pemilik usaha di kelurahan tersebut
- Merintis permohonan pelayanan tera / tera ulang melalui aplikasi online

- Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan dengan indikator kinerja Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik tingkat capaian 226,60%

Faktor yang mempengaruhi :

- Terpeliharanya shelter PKL dalam kondisi baik
- Mempertahankan pasar tradisional berstandar SNI

- Program Stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan indikator kinerja Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok tingkat capaian 869 %

Faktor yang mempengaruhi :

- Menjaga ketersediaan bahan pokok dan barang penting di pasar tradisioal
- Rutin melakukan pemantauan harga bahan pokok dan barang penting di pasar tradisional.

- Program Pelayanan izin usaha simpan pinjam dengan indikator kinerja Persentase jumlah KSP / USP yang memiliki izin usaha simpan pinjam tingkat capaian 109,69%

Faktor yang mempengaruhi :

- Pendampingan dan sosialisasi pengurusan izin usaha simpan pinjam
- Kesadaran pengurus koperasi pentingnya memiliki izin usaha simpan pinjam bagi koperasi

- Program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi dengan indikator kinerja persentase koperasi berkualitas *) tingkat capaian 100,83%

- Monitoring dan pengawasan kepada koperasi untuk selaku melaksankan RAT secara rutin
- Pembinaan kepada koperasi agar menjadi koperasi berkualitas

Adapun beberapa capaian program yang sesuai dengan target yang direncanakan (kategori baik) adalah sebagai berikut :

- Program Pengendalian izin usaha industri kab/kota dengan indikator kinerja Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan

Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait tingkat capaian 100,00 %

Faktor yang mempengaruhi :

- Menjalin kerjasama dengan stakehokder penerbit perizinan agar permohonan perizinan memenuhi persyaratan dan verfikasi teknis dapat dikeluarkan

Adapun beberapa capaian program yang sesuai dengan target yang direncanakan (kategori cukup) adalah sebagai berikut :

- Program Pendidikan dan latihan perkoperasian dengan indikator kinerja Persentase SDM pengelola Koperasi yang meningkat kapasitasnya tingkat capaian 90,00 %

Faktor yang mempengaruhi :

- Koperasi dalam mengirim peserta untuk mengikuti pelatihan masih belum memilih SDM yang benar benar kompeten sehingga pengetahuan yang diperoleh tidak / belum dapat diaplikasi dalam pengelolaan koperasi
- Kurangnya minat pengurus koperasi untuk mengikuti pelatihan perkoperasian

- Program Pengawasan dan pemeriksaaan koperasi dengan indikator kinerja Prosentase koperasi aktif yang patuh terhadap perundang undangan tingkat capaian 98,39 %

Faktor yang mempengaruhi :

- Keterbatasan SDM pengawas koperasi sehingga belum banyak koperasi yang terawasi
- Pengurus koperasi kurang memahami peraturan perkoperasian
- Pengurus koperasi kurang berkompeten

Adapun beberapa capaian program yang sesuai dengan target yang direncanakan (kategori kurang) adalah sebagai berikut :

- Program Pemberdayaan usaha menengah,usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) dengan indikator kinerja Persentase wirausaha pemula yang diberdayakan tingkat capaian 46,75 %

Faktor yang mempengaruhi :

- Dampak pandemi sehingga tidak dapat melaksanakan pelatihan / pembinaan secara tatap muka

- Akibat refocusing anggaran sehingga tidak dapat melakukan pelatihan

➢ Program Pengembangan UMKM dengan indikator kinerja Persentase peningkatan omzet pelaku usaha mikro tingkat capaian - 249,40 %

Faktor yang mempengaruhi :

- Banyak umkm yang mengalami kerugian karena penjualan menurun.
- Banyak umkm yang menutup usahanya

Tabel 2.2
Faktor Penyebab Tidak Tercapai, Tercapai dan Capaian Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang Tahun 2021

No.	Faktor Capaian Program Tidak Sesuai Target	Faktor Capaian Program Sesuai Target	Faktor Capaian Program Melebih Target	Solusi yang dilakukan
1.	Refocusing anggaran			Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang paling penting untuk diprioritaskan dalam mendukung pencapaian tujuan perangkat daerah. Kemudian di sesuaikan anggarannya sesuai dengan anggaran yang ada
2.	Kurangnya SDM baik kualitas maupun kuantitas untuk melakukan pendampingan atau pengawasan kepada umkm / koperasi / IKM			Peningkatan kompetensi aparatur internal melalui pendidikan / latihan
3.	SDM pengelola koperasi / IKM / UMKM kurang kompeten			Diklat perkoperasian kepada pengurus koperasi dan melakukan monitoring pasca pelatihan
4.	Kebijakan penerapan PPKM			Diluar kendali perankat

				daerah
5.		Terjalinnya kerjasama antar stakeholder terkait umkm		Meningkatkan jalinan kerjasama dengan stakeholder
6.			Terlasananya pendampingan dan monitoring yang dilakukan secara berkala / peiodik kepada pelaku usaha	Mempertahan kan dan mencari inovasi dalam pendampingan maupun monitoring

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Ouput)	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2023)	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan dan Keluaran Sub Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target program, Kegiatan, dan Sub kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
							Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Realisasi (%)
		URUSAN PILIHAN										
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INDUSTRI										
	3.31.02	Perencanaan dan pembangunan industri	Persentase pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	1,47%	3,35%		1,25%	7,31%	584,80%	1,19%	2,00%	59,70%
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri yang ditetapkan dalam RPIK	84,00%	87,00%		80,00%	167,54%	209,43%	84,00%	90,00%	103,45%
	3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2	10		3	2	66,67%	2	2	100,00%
	3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4	20		3	3	100,00%	4	4	100,00%
	3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri	2	10		2	2	100,00%	2	2	100,00%
	3.31.03	Pengendalian izin usaha industri kab/kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	75%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	70%	100,00%	100,00%
			Persentase jumlah IKM yang memiliki legalitas usaha	0,75%	4,46%		0,70%	25,97%	371,00%	0,74%	20,00%	448,43%
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan rekomendasi hasil verifikasi teknis pengajuan izin usaha industri	100%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%

	3.31.04	Pengelolaan sistem informasi industri nasional	Ketersediaan informasi industri terkini dan lengkap	90%	95%		80,00%	100,00%	125,00%	90%	100,00%	105,26%
			Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%)	ada	ada		ada	ada		ada	ada	
			Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%)	ada	ada		ada	ada		ada	ada	
			Menyampaikan informasi industri (5 %)	ada	ada		ada	ada		ada	ada	
			Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)	ada	ada		tidak ada	ada		ada	ada	
			Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)	ada	ada		tidak ada	ada		ada	ada	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase data perusahaan industri kecil dan menengah yang masuk dalam Siinas	0,95%	1,19%		0,75%	1,09%	145,33%	0,83%	0,80%	96,39%
	3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem	1	5		1	1	100,00%	1	1	100,00%
		URUSAN PILIHAN										
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
	3.30.02	Perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin usaha	93,88%	96%		85,00%	86,54%	101,81%	91,80%	90,00%	93,75%
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase penerbitan rekomendasi verifikasi teknis pengajuan izin usaha gudang	100%	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang memiliki izin usaha	100,00%	100,00%		90,00%	100,00%	111,11%	80%	100,00%	100,00%
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	100,00%	100,00%		100%	0,00%	0,00%	100%	100,00%	100,00%
	3.30.05	Pengembangan ekspor	nilai ekspor (US$)	US$2.289.000	2.423.087		1.250.000	2.333.573	186,69%	US$2.202.00	2.500.000	103,17%
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan nilai arus barang ke luar daerah	10%	149,65%		10%	71,65%	716,50%	10%	10,00%	6,68%
			Persentase peningkatan nilai arus barang ke luar negeri	2,50%	4,95%		2,50%	-3,69%	-147,60%	2,50%	2,50%	50,51%

	3.30.05.2.01.01		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha produk ekspor unggulan yang dibina	25	50		20	20	100,00%	11	11	100,00%
	3.30.05.2.01.03		Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal	12	60		10	10	100,00%	12	12	100,00%
	3.30.06	Standarisasi dan perlindungan konsumen		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda sah yang berlaku	74,64%	81,43%		70,00%	98,29%	140,41%	72,38%	90,00%	110,52%
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	71%	74%		65%	98,29%	151,22%	70%	90,00%	121,62%
	3.30.06.2.01.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, alat takar , alat timbang , dan alat perlengkapan ditera ulang	3300	12000		3.100	7.494	241,74%	3200	3100	96,88%
	3.30.06.2.01.02		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha dibidang metrologi legal yang dibina	40	200		50	50	100,00%	40	40	100,00%
	3.30.03	Peningkatan sarana distribusi perdagangan		Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik	45%	60%		35%	79,17%	226,20%	40,00%	75,00%	125,00%
	3.30.03.2.02		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100%	100%		100%	50,00%	50,00%	100%	50,00%	50,00%
	3.30.03.2.01.02		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdaganga	5	5		5	5	100,00%	5	4	80,00%
	3.30.03.2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang meningkat kapasitasnya	30%	45%		10%	0,00%	0,00%	25,00%	10,00%	22,22%
	3.30.03.2.02.01		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	5		5	5	100,00%	1	1	100,00%
	3.30.03.2.02.02		Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	50	250		5	5	100,00%	50	50	20,00%
	3.30.04	Stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	< 8	< 8		8,00%	0,92%	869,57%	< 8	5,00%	#VALUE!

	3.30.04.2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase update harga barang kebutuhan pokok dan barang penting masyarakat dalam 1 tahun	65,57%	65,57%		65,57%	67,95%	103,63%	65,57%	60,00%	91,51%
	3.30.04.2.02.02		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah laporan pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 kab / kota	12	60		12	12	100,00%	12	12	20,00%
	3.30.04.2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pupuk dan pestisida yang tersalurkan	75,00%	75%		75%	24,88%	33,17%	75%	30,00%	40,00%
		URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											
	2.17.07	Pemberdayaan usaha menengah,usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)		Persentase wirausaha pemula yang diberdayakan	20%	20%		20%	9,35%	46,75%	20%	20,00%	100,00%
	2.17.07.2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Prosentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam online data system (ODS)	3,70%	4,00%		0,05%	0,40%	800,00%	0,10%	0,10%	100,00%
	2.17.07.2.01.01		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah dokumen pendataan usaha mikro terkait dengan potensi dan pengembangannya	1	5		1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2.17.07.2.01.02		Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	2.160	8.000		2.800	2.700	96,43%	2.000	2.000	100,00%
	2.17.07.2.01.04		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro				90	90	100,00%			#DIV/0!
	2.17.08	Pengembangan UMKM		Prosentase peningkatan omzet pelaku usaha mikro	-2%	3%		-5%	12,47%	-249,40%	-3%	5,00%	166,67%
	2.17.08.2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha	4,50%	6,30%		3,00%	1,63%	54,33%	3,80%	3,50%	55,56%

	2.17.08.2.01.01		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan , pemasaran , SDM serta design dan teknologi	82	250		169	15	8,88%	50	50	100,00%
	2.17.02.	Pelayanan izin usaha simpan pinjam		Persentase jumlah KSP / USP yang memiliki izin usaha simpan pinjam	45,13%	63,52%		35,00%	38,39%	109,69%	40,18%	39,00%	61,40%
	2.17.02.2.02		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi izin usaha koperasi yang diterbitkan	75,00%	75,00%		75,00%	0,00%	0,00%	75,00%	75,00%	100,00%
	2.17.05	Pendidikan dan latihan perkoperasian		Prosentase SDM pengelola Koperasi yang meningkat kapasitasnya	18,84%	29,81%		15,00%	13,50%	90,00%	15,13%	10,00%	33,55%
	2.7.05.2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kab/kota	42%	48%		40%	46,64%	116,60%	41%	45,00%	93,75%
	2.7.05.2.01.01		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan , pemasaran , SDM serta design dan teknologi	60	300		120	120	100,00%	60	60	100,00%
	2.17.03	Pengawasan dan pemeriksaaan koperasi		Prosentase koperasi aktif yang patuh terhadap perundang undangan	41,97%	43,37%		41,00%	40,34%	98,39%	41,49%	40,50%	93,38%
	2.17.03.2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi . KSP , USP koperasi yan mendapat pemeriksaan dan pengawasan	12,44%	12,65%		10,00%	29,83%	298,30%	10,40%	10,00%	79,05%
	2.17.03.2.01.01		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan kesehatan kemandirian ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kab / kota	15	75		20	20	100,00%	15	15	100,00%
	2.17.06	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi		persentase koperasi berkualitas *)	40%	50%		35%	35,29%	100,83%	37%	36,00%	72,00%
	2.17.06.2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase koperasi yang telah diterbitkan sertifikat NIKnya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab / kota	52%	55%		45%	36,13%	80,29%	51%	40,00%	72,73%

	2.17.06.2.01.01		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,	Jumlah koperasi yang diberi dukungan fasilitasi penerbitan NIK	50 Koperasi	50 koperasi		4	4	100,00%	10	15	150,00%
	2.17.04	Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi		Prosentase KSP/USP Koperasi yang meningkat status kesehatannya	26,78%	27,87%		25,00%	24,55%	98,20%	26,45%	25,00%	89,70%
	2.17.04.2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kab / kota	31%	40%		25%	29,02%	116,08%	30%	30,00%	75,00%
	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		persentase terlaksananya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi capaian kinerja sesuai dengan peraturan perundangan - undangan yang berlaku	94%								#DIV/0!
	3.31.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	90%			90%	100%	111,11%			#DIV/0!
	3.31.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	10	2	2	2	100,00%	2	2	100,00%
	3.31.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA -	1	5	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	3.31.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan	1	5	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	3.31.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA - SKPD	1	5	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	3.31.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan	1	5	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	3.31.01.2.01.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	16	80	16	16	16	100,00%	16	16	100,00%

	3.31.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		90%			90%	100%	111,11%			
	3.31.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	70	70		78	78	100,00%	70	70	100,00%
	3.31.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan keuangan akhir tahun	1	5		2	2	100,00%	1	1	100,00%
	3.31.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKDP	12	60		13	13	100,00%	12	12	100,00%
	3.31.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase laporan (CL) administrasi barang milik daerah sesuai aturan	95%	95%		100%	100%	100,00%	95%	95%	100,00%
	2.31.01.2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	persentase laporan (CL) administrasi pendapatan kewenangan PD	90%	90%		100%	100%	100,00%	90%	90%	100,00%
	2.31.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pelayanan administrasi umum	90%	90%		90%	99%	110,00%	90%	90%	100,00%
	2.31.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10	10		10	10	100,00%	10	10	100,00%
	2.31.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4	4		4	4	100,00%	4	4	100,00%
	2.31.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12	12		12	12	100,00%	12	12	100,00%
	2.31.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4	4		4	4	100,00%	4	4	100,00%
	2.31.01.2.06.07		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket n Bahan/Material yang disediakan	15	15		15	15	100,00%	15	15	100,00%
	2.31.01.2.06.08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10	10		10	9	90,00%	10	10	100,00%
	2.31.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah lapora penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	40		40	40	100,00%	40	40	100,00%

	2.31.01.2.07		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		persentase pengadaan barang milik daerah	100%			100%	100%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	2.31.01.2.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0	0		7	7	100,00%	-	-	0,00%
	2.31.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	95%			100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	2.31.01.2.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12		12	12	100,00%	12	12	100,00%
	2.31.01.2.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12		12	12	100,00%	12	12	100,00%
	2.31.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persentase pemelihharaan barang milik daerah	75%	80%		75%	73%	97,65%	75,00%	60,00%	75,00%
	2.31.01.2.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelaihara dan dibayrkan pajaknya	50	50		50	35	70,00%	50	50	100,00%
	2.31.01.2.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas oeprasional atau lapangan yang dipelaihara dan dibayrkan pajaknya	20	20		20	12	60,00%	20	20	100,00%
	2.31.01.2.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlh peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	27	27		27	17	62,96%	27	27	100,00%
	2.31.01.2.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung atau bangunan lainnya yng dipelihara / direhab	12	12		12	12	100,00%	12	12	100,00%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, Kota Magelang dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang Kota Magelang akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Capaian Kinerja pelayanan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang berdasarkan indikator kinerja pada RPJMD Kota Magelang adalah sebagai berikut.

Tabel 2.4
Sasaran Strategi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			Kategori
				TARGET	REALISASI	%	
1	Meningkatnya kontribusi sector ekonomi unggulan		Persentase kontribusi PDRB Sektor industri pengolahan	16,14%	16,13%	99,94%	Cukup
			Persentase kontribusi PDRB Sektor perdagangan	13,65%	14,94%	109,45%	Sangat baik
		Meningkatkan pemberdayaan industri melalui peningkatan nilai tambah produksi IKM	Persentase pertumbuhan nilai produksi IKM	3,30%	3,20%	96,97%	Cukup
		Meningkatkan kinerja perdagangan daerah	Persentase pertumbuhan volume perdagangan daerah	10,00%	19,98%	199,80%	Sangat baik
2	Meningkatnya daya beli masyarakat		Pengeluaran per kapita yang disesuaikan	12.500.000			
		Pengendalian dan pengawasan Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harga dan stoknya stabil	60,00%	60%	100,00%	Baik
3	Meningkatnya pertumbuhan industri kreatif dan usaha mikro		Persentase pertumbuhan UMKM	4,50%	3%	66,67%	kurang
		Meningkatkan daya saing usaha mikro	Persentase usaha mikro yang meningkat kapasitasnya	3,25%	3,50%	107,69%	Sangat baik
		Pertumbuhan usaha koperasi	Peningkatan volume usaha koperasi (Total volume usaha koperasi dalam 1 tahun)	41.500.000.000	41.227.671.003	99,34%	cukup
4	Terwujudnya birokrasi yang responsif , akuntabel dan inovatif		Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan OPD	70%	65%	92,86%	
		Terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP OPD	75	Belum ada review dari OPD terkait		

Dari 6 Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang dilihat dari tingkat capaiannya terdapat 2 target sasaran strategis dengan katogori cukup yaitu sasaran pertumbuhan usaha koperasi dan Meningkatkan pemberdayaan industri melalui peningkatan nilai tambah produksi IKM , sedangkan 1 sasaran belum diketahui realisasinya dikarenakan penilaian / review melibatkan OPD terkait yaitu Inspektorat.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang sebagai organisasi perangkat daerah dalam urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro , urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian, disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK		Target					Realisasi Capaian Tahun 2021	Proyeksi			Catatan Analisis
					Outcome	Output	2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	
	URUSAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO ,KECIL ,MENENGAH															
	Meningkatnya pertumbuhan industri kreatif dan usaha mikro		Persentase pertumbuhan UMKM				4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	3%	3,25%	3,50%	4,00%	Semakin membaiknya kondisi ekonomi,sulitnya mendapatkan lapngan kerja sehingga orang beralih ke wirausaha
		Pertumbuhan usaha koperasi	Peningkatan volume usaha koperasi (Total volume usaha koperasi dalam 1 tahun)				45.650.000.000	50.215.000.000	55.236.500.000	60.760.150.000	66.836.165.000	41.227.671.003	41.227.671.003	41.227.671.003	41.227.671.003	Kurangnya minat menjadi anggota koperasi sehingga koperasi kurang berkembang
					Meningkatnya Koperasi yang berkualitas		37,00%	40,00%	44,00%	46,00%	50,00%	35,29%	16,81%	38,00%	39,00%	Semakin banyaknya pengelola koperasi yang meningkat kemampuannya untuk mengembangkan koperasi
						Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah dalam daerah kabupaten/kota	5%	6%	7%	8%	10%	0,00%	0,00%	5,00%	6,00%	Bersinergi dengan OPD yang mempunyai kewenangan menerbitkan perizinan
						Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	kewenangan penerbitan perizinan ada di OPD DPMPTSP
						Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	29%	29%	29%	29%	29%	32,77%	6,31%	29,00%	29,00%	sd semester I tahun 2023 baru 14 koperasi yang telah dilakukam pemeriksaan

						Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	30%	30%	30%	30%	30%	29,01%	6,31%	30,00%	30,00%	sd semester I tahun 2023 baru 14 koperasi yang telah dilakukam pemeriksaan
						Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	41,00%	42,00%	43,00%	48,00%	48,00%	46,63%	46,64%	47,00%	48,00%	s/d semestar I tahun 2023 jumlah koperasi yang telah mengikuti pelatihan sebanyak 111 unit koperasi
						Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,06%	0,07%	0,08%	0,09%	1,00%	0,22%	0,22%	0,50%	0,60%	
						Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,52%	2,52%	2,50%	2,50%	
						Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	51,00%	52,00%	53,00%	54,00%	55,00%	36,13%	36,13%	36,13%	36,13%	keterbetasan SDM
						Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasidengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,20%	0,00%	0,00%	0,00%	keterbatasan anggaran untuk pemberian hibah kepada koperasi

						Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0%	0%	0%	keterbetasan SDM
						Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	50%	50%	50%	50%	50%	50,42%	50,42%	50,00%	50,00%	keterbetasan SDM
						Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	keterbetasan SDM
		Meningkatkan daya saing usaha mikro	Persentase usaha mikro yang meningkat kapasitasnya				3,57%	3,92%	4,21%	4,62%	4,73%	3,50%	3,75%	4,00%	4,00%	Semakin banyaknya pelaku UMKM yang telah memperoleh pendampingan / pelatihan kewirausahaan
					Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha		100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	umkm yang sedang memulai usaha akan didampingi
						Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	3,49%	0,00%	0,00%	0,00%	Pendataan belum selesai
						Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	0,10%	0,11%	0,12%	0,13%	0,14%	0,00%	0,00%	0,13%	0,14%	keterbatasan SDM
						Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	keterbatasan SDM
						Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	2,59%	2,71%	2,83%	2,95%	3,07%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	

						Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	
						Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	2,23%	2,55%	2,88%	3,20%	3,53%	2,07%	2,07%	3,20%	3,53%	
						Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	keterbatasan SDM
URUSAN PERDAGANGAN																
	Meningkatnya kontribusi sector ekonomi unggulan		Persentase kontribusi PDRB Sektor perdagangan				13,65%	13,66%	13,67%	13,68%	13,69%	14,94%	15,00%	15,00%	15,00%	Semakin membaiknya kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat
		Meningkatkan kinerja perdagangan daerah	Persentase pertumbuhan volume perdagangan daerah				10,00%	11,36%	11,43%	11,72%	12,13%	19,98%	20,00%	20,00%	20,00%	Semakin membaiknya kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat
					Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)		50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	57,18%				
						Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan										
						a.Pusat perbelanjaan										Bukan kewenangan OPD
						b.Toko Swalayan										Bukan kewenangan OPD
						Persentase penerbitan TDG	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	
						Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	91,07%	91,23%	91,38%	91,53%	91,67%	90,90%	70,00%	70,00%	70,00%	
						Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :										

						a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
						b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
						c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
						Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
						Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
						Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	73,00%	76,00%	79,00%	82,00%	85,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	
					Persentase Kinerja realisasi Pupuk		22,60%	22,60%	22,60%	22,60%	22,60%	22,39%	22,00%	22,00%	22,00%	
						Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	25,12%	25,12%	25,12%	25,12%	25,12%	24,88%	25,00%	25,00%	25,00%	
					Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku		72,38%	74,64%	76,90%	79,17%	81,43%	98,29%	90,00%	90,00%	90,00%	
						Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	70%	71%	72%	73%	74%	98,29%	75,00%	75,00%	75,00%	
						Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	40,00%	45,00%	50,00%	55,00%	60,00%	37,50%	40,00%	40,00%	40,00%	

	Meningkatnya daya beli masyarakat		Pengeluaran per kapita yang disesuaikan				12.565.000	12.705.000	12.846.000	12.987.000	13.127.000	NA	12.500.000	12.600.000	12.650.000	Terkandalinya harga barang kebutuhan pokok
		Pengendalian dan pengawasan Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harga dan stoknya stabil				62,50%	62,50%	62,50%	62,50%	62,50%	60%	65,00%	65,00%	65,00%	Terkandalinya harga barang kebutuhan pokok
						Persentase koefisien variasi harga antar waktu	< 8	< 8	< 8	< 8	< 8	0,92%	2,00%	2,50%	3,00%	Terkandalinya harga barang kebutuhan pokok
	URUSAN INDUSTRI															
	Meningkatnya kontribusi sector ekonomi unggulan		Persentase kontribusi PDRB Sektor industri pengolahan				16,14%	16,15%	16,16%	16,17%	16,18%	16,13%	16,15%	16,15%	16,15%	Semakin benyak pelaku IKM yang berproduksi
		Meningkatkan pemberdayaan industri melalui peningkatan nilai tambah produksi	Persentase pertumbuhan nilai produksi IKM				3,30%	3,40%	3,50%	3,70%	4,00%	3,20%	3,50%	3,60%	3,70%	Semakin benyak pelaku IKM yang berproduksi
					Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota		1,19%	1,47%	1,74%	1,99%	3,35%	-0,29%	1,00%	1,25%	1,50%	
					Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK		84,00%	84,00%	84,00%	83,00%	82,00%	167,54%	90,00%	90,00%	90,00%	
					Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0%	0%	0%	0%	
					Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0%	0%	0%	Keterbatasan lahan untuk perluasan industri

					Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0%	0%	0%	Keterbatasan lahan untuk perluasan industri
					Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0%	0%	0%	Keterbatasan lahan untuk perluasan industri
					Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		90%	90%	90%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	
					Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%)											
					Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%)											
					Menyampaikan informasi industri (5 %)											
					Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)											
					Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)											
						Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				dpmptsp
						Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				Perda RPIK Kota Magelang Nomor : 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan

						Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
						Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
						Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	0,83%	0,95%	1,07%	1,19%	1,31%	3,16%				

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang menghadapi isu penting sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja perdagangan daerah
2. Meningkatkan daya saing usaha mikro
3. Mewujudkan koperasi yang modern, berdaulat dan maju
4. Pemberdayaan industri melalui peningkan nilai tambah IKM4.

2.3.1 Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang

Sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang mempunyai tugas dan fungsi yaitu :

Tugas : Membantu walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Fungsi :

a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya dan ;

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja pelayanan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang difokuskan pada :

- Pengembangan perdagangan lokal dengan penyediaan pasar tradisional yang representatif yang dapat meningkatkan omzet pedagang pasar, shelter PKL dalam kondisi baik untuk meningkatkan omzet PKL shelter.
- Peningkatan kemampuan dan pengetahuan pelaku IKM agar dapat memproduksi barang yang berkualitas dan berdaya saing.
- Peningkatan kemampuan, pengetahuan dan memberikan pendampingan kepada pelaku umkm dalam upaya umkm naik kelas (scalling up).

- Pembinaan / pelatihan, pengawasan, pendampingan secara berkala dan terus menerus untuk mewujudkan koperasi yang modern dan berdaulat.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang

Permasalahan dan hambatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

TABEL 2.6

Masalah Pokok dan Akar Masalah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang

No	Masalah Pokok	Masalah			Akar Masalah
		Urusan Koperasi dan UMKM	Urusan Perdagangan	Urusan Perindustrian	
	Belum optimalnya pertumbuhan sector perdagangan. industri, Koperasi dan UMKM	Pengelolaan koperasi belum memadai			Kemampuan manajerial pengelola koperasi rendah Kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional kegiatan koperasi
		Kualitas pelaku UMKM masih rendah			Keterbatasan modal Belum optimalnya pemasaran Managemen pengelolaan usaha belum memadai
			Rendahnya daya saing sector perdagangan Belum optimalnya pengelolaan informasi harga barang kebutuhan pokok di pasar tradisional		Sarana distribusi perdagangan (pasar tradisional / shelter PKL) belum memenuhi standar Managemen pengelolaan sarana distribusi perdagangan belum memadai Keterbatasan lahan untuk pengembangan pasar Kurangnya promosi pasar Cakupan informasi update harga barang kebutuhan pokok masih sempit Kurangnya sarana /

No	Masalah Pokok	Masalah			Akar Masalah
		Urusan Koperasi dan UMKM	Urusan Perdagangan	Urusan Perindustrian	
					prasarana pendukung untuk penyampaian informasi update harga barang kebutuhan pokok
				Rendahnya Daya Saing hasil industri	Rendahnya mutu produk Minimnya kapasitas produksi
				Masih sedikit pelaku IKM yang memiliki legalitas usaha	Keterbatasan permodalan. Kurangnya kesadaran pelaku usaha IKM pentingnya legalitas usaha
				Pengelolaan informasi industri belum memadai	Keterbatasan personil yang menghimpun informasi industri untuk diintegrasikan di SIINAS

2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021–2026, ditetapkan visi pembangunan Kota Magelang yaitu **" Magelang Maju Sehat dan Bahagia "** Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien disusunlah misi Kota Magelang, yaitu:

MISI I Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beradab, toleran berlandaskan IMTAQ.

MISI 2 Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

MISI 3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Inovatif.

MISI 4 Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan peningkatan peran UMKM berbasis ekonomi kerakyatan.

MISI 5 Mewujudkan kota modern yang berdaya saing dengan peningkatan kualitas tata ruang dan infrastruktur.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, sebagai garda depan menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memberikan kemudahan dalam rangka mendukung misi ke- 2 Kota Magelang yaitu, Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan Misi ke – 4 yaitu, Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan peningkatan peran UMKM berbasis ekonomi kerakyatan.

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang terdapat tantangan dan peluang. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain :

a. Adanya persingan yang cukup kompetitif dengan daerah di sekitarnya.
b. Rendahnya pengalaman dalam berwirausaha.
c. Teknologi informasi yang memudahkan konsumen dalam memilih dan membeli barang (jual beli online).

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

a. Regulasi pemerintah yang berpihak kepada pasar tradisional dan PKL.
b. Perkembangan teknologi informatika yang cukup pesat di Kota Magelang, memberikan peluang untuk perluasn pasar Koperasi dan UMKM secara *online.*
c. Adanya perhatian Pemerintah Kota Magelang terhadap sektor industri, perdagangan dan jasa.

2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2023

Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang dalam pelaksanan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain :

TABEL 2.7

Masalah dan Strategi Pemecahan Masalah Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang

No	Masalah	Strategi Pemecahan masalah
A	**Bidang Koperasi dan Usaha Mikro :**	
1.	Kualitas pelaku UMKM masih rendah	Pelatihan SDM pelaku UMKM
2.	Pengelolaan koperasi belum memadai	Pelatihan SDM pengelola koperasi
B	**Bidang Perdagangan**	
1	Rendahnya daya saing sector perdagangan	Peningkatan sarana dan prasarana distribusi perdagangan (pasar tradisional dan shelter PKL yang ada)
		Peningkatan SDM pengelola sarana distribusi perdagangan
		Peningkatan SDM pedangan pasar
2	Belum optimalnya pengelolaan informasi harga barang kebutuhan pokok di pasar tradisional	
C.	**Bidang Industri**	
1	Rendahnya Daya Saing hasil industry	Peningkatan SDM pelaku IKM Standarisasi produk
2	Masih sedikit pelaku IKM yang memiliki legalitas usaha	Pemberian Fasilitasi /pendampingan kepada IKM pengurusan legalitas usaha / produk
3	Pengelolaan informasi industri belum memadai	

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023. Rancangan awal RKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang melaksana 3 urusan yaitu :

a. Urusan wajib bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi dan Usaha Mikro , Kecil dan Menengah terdiri dari 4 program 4 kegiatan dan 6 Sub kegiatan .
b. Urusan Pilihan Bidang Perdagangan terdiri dari 4 program , 5 kegiatan dan 9 Sub Kegiatan.
c. Urusan Pilihan Bidang Perindustrian terdiri 2 program 2 kegiatan dan 5 Sub kegiatan

d. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota terdiri dari 6 kegiatan dan 27 sub kegiatan sebagai pendukung untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran. Secara lebih jelas, rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.8

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kota Magelang

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	DAU		DAK F	DAK NF	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
						RKM	Non RKM							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	URUSAN BIDANG KOPERASI DAN UKM				**1.747.031.444**								**1.635.725.320**	
	Pengawasan dan pemeriksaaan koperasi		Prosentase koperasi aktif yang patuh terhadap perundang undangan	41,97%	20.376.000						Prosentase koperasi aktif yang patuh terhadap perundang undangan	41,97%	20.376.000	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		***Persentase koperasi . KSP , USP koperasi yan mendapat pemeriksaan dan pengawasan***	***12,44%***	***20.376.000***						***Persentase koperasi . KSP , USP koperasi yan mendapat pemeriksaan dan pengawasan***	***12,44%***	***20.376.000***	
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan kesehatan kemandirian ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kab / kota	5	10.323.000		10.323.000	0	0		Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan kesehatan kemandirian ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kab / kota	5	10.323.000	
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah koperasi yang memenuhi peraturan perundang - undangan kewenangan kab / kota	15	10.053.000		10.053.000				Jumlah koperasi yang memenuhi peraturan perundang - undangan kewenangan kab / kota	15	10.053.000	
	Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi		Prosentase KSP/USP Koperasi yang meningkat status kesehatannya	26,78%	0						Prosentase KSP/USP Koperasi yang meningkat status kesehatannya	26,78%	0	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		***Persentase usaha simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kab / kota***	***31%***	***0***						***Persentase usaha simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kab / kota***	***31%***	***0***	

			Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah koperasi yang mendapat penghargaan kesehatan	3	0						Jumlah koperasi yang mendapat penghargaan kesehatan		0	tidak dianggarkan
	Pendidikan dan latihan perkoperasian				Prosentase SDM pengelola Koperasi yang meningkat kapasitasnya	18,84%	103.274.000						Prosentase SDM pengelola Koperasi yang meningkat kapasitasnya	18,84%	103.274.000	
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			***Prosentase koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kab/kota***	***42%***	***103.274.000***						***Prosentase koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan***	***42%***	***103.274.000***	
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kota Magelang	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	60	103.274.000		0		103.274.000		Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	60	103.274.000	penyesuaian nomenklatur indikator sub kegiatan
	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi				persentase koperasi berkualitas *)	40%	15.561.000						persentase koperasi berkualitas *)	40%	0	
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			***Prosentase koperasi yang telah diterbitkan sertifikat NIKnya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab / kota***	***52%***	***15.561.000***						***Prosentase koperasi yang telah diterbitkan sertifikat NIKnya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab / kota***	***52%***	***0***	
			Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah koperasi yang diberi dukungan fasilitasi penerbitan NIK	50 koperasi	15.561.000		0				jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan kewirausahaan		0	Rasionalisasi I dan indikator kinerja sub kegiatan perlu disesuaikan bukan ukm dan kewirausahaan tetapi koperasi)

	Pemberdayaan usaha menengah,usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)				Persentase wirausaha pemula yang diberdayakan	20%	1.195.536.944						Persentase wirausaha pemula yang diberdayakan	20%	1.137.075.320	
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			***Persentase pelaku usaha mikro yang memiliki izin/legalitas usaha***	***3,70%***	***1.195.536.944***						***Persentase pelaku usaha mikro yang memiliki izin/legalitas usaha***	***3,70%***	***1.137.075.320***	
			Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Magelang	Jumlah dokumen pendataan usaha mikro terkait dengan potensi dan pengembangannya	1 dokumen	80.877.000	0	0				Jumlah unit usaha yang produktif , bernilai tambah,memiliki akses pembiayaan , penguatan kelembagaan , penataan managemen,standaisasi dan restrukturisasi usaha kewenagan kab /		0	Rasionalisasi II
			Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kota Magelang	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	2160 umkm	0						Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kementriaan usaha mikro		0	tahun 2022 tidak dianggarkan
			Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kota Magelang	Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan		0						Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan		0	tahun 2022 tidak dianggarkan
			Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kota Magelang	Jumlah SDM yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		0						Jumlah SDM yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		0	tahun 2022 tidak dianggarkan
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Magelang	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	2000	542.043.944	5.570.000	437.238.120	0			Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	2.000	442.808.120	Rasionalisasi II
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Kota Magelang	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	150	572.616.000	6.400.000	466.323.000		187.544.200		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	150	694.267.200	akomodir aspirasi dari Pokir

	Pengembangan UMKM				Prosentase peningkatan omzet pelaku usaha mikro	-2%	412.283.500						Prosentase peningkatan omzet pelaku usaha mikro	-2%	375.000.000	
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			***Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha***	***4,50%***	***412.283.500***						***Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha***	***4,50%***	***375.000.000***	
			Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kota Magelang	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan , pemasaran , SDM serta design dan teknologi	50	412.283.500		215.000.000				Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan , pemasaran , SDM serta design dan teknologi	137	375.000.000	akomodir aspirasi dari Pokir DPRD
	URUSAN BIDANG PERDAGANGAN						5.991.234.133								5.409.295.913	
	Peningkatan sarana distribusi perdagangan				Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik	50%	4.081.546.133						Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik	50%	3.828.392.133	
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			***Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya***	***100%***	***3.248.275.133***						***Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya***	***100%***	***3.048.275.133***	
			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Magelang	Jumlah sarana distribusi perdagangan	1	200.000.000	0	100.000.000				Jumlah sarana distribusi perdagangan	1	100.000.000	Usulan FGD : Melakukan terobosan tentang
			Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Magelang	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdaganga	5	3.048.275.133		2.948.275.133				Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdaganga	5	2.948.275.133	
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			***persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang meningkat kapasitasnya***	***30%***	***833.271.000***						***persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang meningkat kapasitasnya***	***30%***	***780.117.000***	
			Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Magelang	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12	786.081.000	6.000.000	774.117.000				Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12	780.117.000	Usulan FGD : pengembangan tempat kuliner untuk peningkatan penghasilan masyarakat dan

			Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Magelang	Jumlah hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	75	47.190.000		0				Jumlah hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		0	Rasionalisasi II
	Stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting				Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	< 8	68.034.000						Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	< 8	68.034.000	
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			***Persentase update harga barang kebutuhan pokok dan barang penting masyarakat dalam 1 tahun***	***65,57%***	***68.034.000***						***Persentase update harga barang kebutuhan pokok dan barang penting masyarakat dalam 1 tahun***	***65,57%***	***68.034.000***	
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah laporan pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 kab / kota	240	68.034.000		68.034.000				Jumlah laporan pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 kab / kota	240	68.034.000	
	Pengembangan ekspor				nilai ekspor	US$2.289.000	802.736.000						nilai ekspor	US$2.289.000	557.736.000	
		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang			***Persentase peningkatan nilai arus barang ke luar daerah***	***10%***	***802.736.000***						***Persentase peningkatan nilai arus barang ke luar daerah***	***10%***	***557.736.000***	
			Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah pelaku usaha produk ekspor unggulan yang dibina	12	7.736.000		7.736.000				Jumlah pelaku usaha produk ekspor unggulan yang dibina	12	7.736.000	
			Pameran Dagang Nasional	Kota Magelang	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	6	245.000.000		0				Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang		0	Rasionalisasi II (Kebijakan pimpinan diperbanyak
			Pameran Dagang Lokal	Kota Magelang	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal	12	550.000.000		550.000.000				Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal	12	550.000.000	

	Standarisasi dan perlindungan konsumen				Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda sah yang berlaku	74,64%	205.647.000						Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda sah yang berlaku	74,64%	175.016.780	
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			***Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan***	***71%***	***205.647.000***						***Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan***	***71%***	***175.016.780***	
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kota Magelang	Jumlah alat ukur, alat takar , alat timbang , dan alat perlengkapan ditera ulang	3300	193.127.000		164.327.000				Jumlah alat ukur, alat takar , alat timbang , dan alat perlengkapan ditera ulang	3300	164.327.000	Rasionalisasi anggaran
			Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kota Magelang	Jumlah pelaku usaha dibidang metrologi legal yang dibina	75	12.520.000		10.689.780				Jumlah pelaku usaha dibidang metrologi legal yang dibina	75	10.689.780	Rasionalisasi anggaran
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**persentase terlaksananya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi capaian kinerja sesuai dengan peraturan perundangan - undangan yang berlaku**	**91%**	**12.695.800.820**						**persentase terlaksananya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi capaian kinerja sesuai dengan peraturan perundangan - undangan yang berlaku**		**10.766.279.173**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			***persentase ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD***	***90%***	***65.009.000***						***persentase ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD***			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Magelang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	4.414.000		2.414.000				Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	2.414.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA - SKPD	1	1.542.000		742.000				Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA - SKPD	1	742.000	

			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA - SKPD	1	1.112.000		785.000				Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA - SKPD	1	785.000	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA - SKPD	1	1.948.000		707.000				Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA - SKPD	1	707.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA - SKPD	1	1.564.000		769.000				Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA - SKPD	1	769.000	
			koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Magelang	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	16	48.920.000		48.920.000				Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		48.920.000	RFK,CAKIN Triwulan,
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Magelang	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4	5.509.000		2.500.000				Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	16	2.500.000	LKJip,LPPD,LKPJ, LKj
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			***persentase ketersediaan laporan (CL) administrasi keuangan PD sesuai aturan***	***90%***	***11.064.843.820***						***persentase ketersediaan laporan (CL) administrasi keuangan PD sesuai aturan***		***9.297.115.789***	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Magelang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	70	11.000.911.000		9.244.588.877				Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	70	9.244.588.877	Hasil penghitungan BPKAD
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Magelang	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifiaksi keuangan SKPD	1200	2.000.000		1.000.000				Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifiaksi keuangan	1200	1.000.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Magelang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan keuangan akhir tahun	1	1.500.000		1.500.000				Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan keuangan akhir tahun	1	1.500.000	

			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Magelang	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	1	1.750.000		0				Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan		0	Rasionalisasi anggaran I
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Magelang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKDP	13	57.432.820		50.026.912				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKDP	13	50.026.912	
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Magelang	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	2	1.250.000		0				Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran		0	Rasionalisasi anggaran I
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			persentase laporan (CL) administrasi pendapatan kewenangan PD	90%	***5.083.000***						persentase laporan (CL) administrasi pendapatan kewenangan PD	90%	***4.427.000***	
			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Magelang	Jumlah laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	*12*	5.083.000		4.427.000				Jumlah laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	*12*	4.427.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			***persentase pelayanan administrasi umum***	***90%***	***170.805.000***						***persentase pelayanan administrasi***	***90%***	***159.092.000***	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Magelang	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	80	8.518.000		7.705.000				Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	80	7.705.000	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Magelang	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1500	29.170.000		23.890.000				Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1500	23.890.000	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Magelang	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	110	20.000.000		18.200.000				Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	110	18.200.000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Magelang	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	720	6.000.000		6.000.000				Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	720	6.000.000	

			Penyediaan Bahan/Material	Kota Magelang	Jumlah paket n Bahan/Material yang disediakan	250	19.017.000		17.357.000				Jumlah paket n Bahan/Material yang disediakan	250	17.357.000	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Magelang	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10	8.100.000		5.940.000				Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10	5.940.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Magelang	Jumlah lapora penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	80.000.000		80.000.000				Jumlah lapora penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	80.000.000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					***880.053.000***								***870.275.384***	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	2.100.000		1.900.000				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	1.900.000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	580.000.000		580.000.000				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	580.000.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	297.953.000		288.375.384				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	288.375.384	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			persentase pemelihharaan barang milik daerah	***75%***	***510.007.000***						persentase pemelihharaan barang milik daerah	***75%***	***435.369.000***	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Magelang	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelaihara dan dibayrkan pajaknya	1	28.100.000		25.290.000				Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelaihara dan dibayrkan pajaknya	1	25.290.000	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Magelang	Jumlah kendaraan dinas oeprasional atau lapangan yang dipelaihara dan dibayrkan pajaknya	70	386.755.000		348.079.000				Jumlah kendaraan dinas oeprasional atau lapangan yang dipelaihara dan dibayrkan pajaknya	70	348.079.000	

			Pemeliharaan Mebel	Kota Magelang	Jumlah mebel yang dipeliharan	5	3.000.000		2.000.000				Jumlah mebel yang dipeliharan	5	2.000.000	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Magelang	Jumlh peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25	37.000.000		20.000.000				Jumlh peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25	20.000.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Magelang	Jumlah sarana dan prasarana gedung atau bangunan lainnya yng dipelihara / direhab	5	55.152.000		40.000.000				Jumlah sarana dan prasarana gedung atau bangunan lainnya yng dipelihara / direhab	5	40.000.000	
	URUSAN BIDANG PERINDUSTRIAN						2.826.936.600								1.942.791.100	
	Perencanaan dan pembangunan industri				Persentase pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	1,47%	2.729.530.100						Persentase pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	1,47%	1.862.791.100	
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			***Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri yang ditetapkan dalam RPIK***	***84,00%***	***2.729.530.100***						***Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri yang ditetapkan dalam RPIK***	***84,00%***	***1.862.791.100***	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	6	489.874.000						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya			
					AKTIVITAS :								AKTIVITAS :			
					Jumlah IKM yang mengikuiti pelatihan diversifikasi makanan ringan	30							Jumlah IKM yang mengikuiti pelatihan diversifikasi makanan ringan			
					Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan kemasan dan labeling	30							Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan kemasan dan			
					Jumlah sentra IKM yang direvitalisasi	2							Jumlah sentra IKM yang direvitalisasi			
					Jumlah IKM yang diikutkan dalam pameran industri tk Nasional / lokal	75							Jumlah IKM yang diikutkan dalam pameran industri tk Nasional / lokal			
					Jumlah IKM yang mengikuti gebyar kerajinan	2							Jumlah IKM yang mengikuti gebyar kerajinan			
					Jumlah peserta sarasehan industri	75							Jumlah peserta sarasehan industri			
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3	1.369.250.000		992.385.000				Pengelolaan dan operasional IKM center	1	992.385.000	

					AKTIVITAS :											
					Pengelolaan dan operasional IKM center	12										
					Pengadaan peralatan / perlengkapan gedung kantor	8							Pengadaan peralatan / perlengkapan gedung kantor			
					Penyediaan sumber daya untuk operasional IKM ceter	12							Penyediaan sumber daya untuk operasional IKM			
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		755.858.100		755.858.100				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	755.858.100	
					AKTIVITAS :								AKTIVITAS :			
					Jumlah IKM yang difasilitasi sertifikasi halal (produk makanan)	30							Jumlah IKM yang difasilitasi sertifikasi halal (produk makanan)			
					Jumlah peserta IKM yang mengikuti pelatihan AMT	30							Jumlah peserta IKM yang mengikuti pelatihan AMT			
					Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan digital marketing	20							Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan digital marketing			
					Jumlah peserta pelatihan HACCP (produk pangan)	20							Jumlah peserta pelatihan HACCP (produk pangan)			
					Jumlah peserta pelatihan produksi olahan makanan	60							Jumlah peserta pelatihan produksi olahan makanan			
					Jumlah gedung IKM center yang dibangun	1							Jumlah gedung IKM center yang			
					Pengelolaan IKM center :								Pengelolaan IKM center :			
					Jumlah yang mengikuti pelatihan pengelolaan IKM center	15							Jumlah yang mengikuti pelatihan pengelolaan IKM center			
					Jumlah laporan pengelolaan ikm center yang disusun	12							Jumlah laporan pengelolaan ikm center yang disusun			
			Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kota Magelang	Jumlah dokumen Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri	4	114.548.000		114.548.000				Jumlah dokumen Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri		114.548.000	

	Pengendalian izin usaha industri kab/kota				Persentase jumlah IKM yang memiliki legalitas usaha	0,75%	17.406.500						Persentase jumlah IKM yang memiliki legalitas usaha		0	
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			Persentase penerbitan rekomendasi hasil verifikasi teknis pengajuan izin usaha industri	100%	***17.406.500***						Persentase penerbitan rekomendasi hasil verifikasi teknis pengajuan izin usaha industri		***0***	
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Magelang	Jumlah dokumen hasil fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dan atau dalam rangka perluasan usaha bidang untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah tinggi dan tinggi	15	17.406.500		0				Jumlah dokumen hasil fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dan atau dalam rangka perluasan usaha bidang untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah tinggi dan tinggi		0	Rasionalisasi
	Pengelolaan sistem informasi industri nasional				Ketersediaan informasi industri terkini dan lengkap	90%	80.000.000						Ketersediaan informasi industri terkini dan lengkap	90%	80.000.000	
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			Persentase data perusahaan industri kecil dan menengah yang masuk dalam Siinas	***0,95%***	***80.000.000***						Persentase data perusahaan industri kecil dan menengah yang masuk dalam Siinas	***0,95%***	***80.000.000***	
			Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	80.000.000		80.000.000				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	80.000.000	
	TOTAL						**23.261.002.997**	**17.970.000**	**############**	**0**	**290.818.200**				**19.754.091.506**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang sebagai unsur perencana pembangunan daerah melakukan penjaringan aspirasi masyarakat yaitu pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, sampai Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Regional dan Nasional tetap melakukan upaya dalam rangka pelaksanaan pentahapan proses perencanaan pembangunan. Di dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan pengkajian usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dan berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan dengan tetap memperhatikan agenda prioritas pembangunan tahun 2023 yang tertuang di dalam RPJMD 2018-2023. Usulan dari pemangku kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Usulan Program kegiatan masyarakat melalui Musrenbang mulai dari Musrenbang tingkat Kecamatan untuk tahun 2023 yang sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang diakomodir dalam program dan kegiatan Rencana Kerja, sebagai berikut:

Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kota Magelang

No	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan			Lokasi	Inidikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
	Pengembangan UMKM						
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil					
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Kota Magelang	Jumlah umkm yang mengikuti pelatihan target 40 orang'	Rp 54.000.000	Usulan Pokir anggota DPRD Kota Magelang
			Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan	Kota Magelang	Jumlah umkm yang memperoleh bantuan sosial untuk usaha 60 Orang	Rp333.678.000	Usulan Pokir anggota DPRD Kota Magelang

	Peningkatan sarana distribusi perdagangan						
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya					
			Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi	Kota Magelang	Jumlah gerobak untuk PKL 21 buah	Rp 78.500.000	Usulan Pokir anggota DPRD Kota Magelang
					Jumlah gerobak untuk umkm 2 buah	Rp 6.000.000	Rodanya Masbagya
	Perencanaan dan pembangunan industri						
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kota Magelang	Jumlah ikm mengikuti pelatihan teknis industri	Rp 6.250.000	Usulan Pokir anggota DPRD Kota Magelang
					Jumlah ikm mengikuti pelatihan teknis industri	Rp 61.500.000	Musrenbang
					Jumlah ikm mengikuti pelatihan teknis industri	Rp 39.500.000	Rodanya Masbagya

	Pemberdayaan usaha menengah,usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)						
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Magelang	Pelatihan umkm	Rp 5.570.000	Rodanya Masbagya

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN 2020-2024 merupakan periode IV dari Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk mewujudkan visi **"Indonesia 2045 Berdaulat, Adil, Makmur".** Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, sesuai dengan tema RPJMN IV **"Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing".** Dalam rancangan teknokratik, RPJMN 2020-2024 dijabarkan dalam 7 agenda pembangunan yaitu (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; (7) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

RPJMN 2020-2024 menargetkan Indikator pada setiap dinas. Target RPJMN ini menghadapi tantangan global yang belum

kondusif, merupakan dampak dari bencana virus corona (Covid-19) pada awal Tahun 2020.

Dalam Penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang Tahun 2023 mengacu pada kebijakan Nasional, Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berpedoman pada hasil penyelarasan/sinkronisasi prioritas pembangunan Pusat dan Provinsi Jawa Tengah serta memperhatikan saran dan masukan dari peserta Forum Konsultasi Publik, maka prioritas pembangunan yang diprioritaskan sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Kota Magelang
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumabuhan berkualitas dan berkadilan (PN 1)	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Penguatan ekonomi lokal
2	Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing (PN 3)	Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	Pemberdayaan masyarakat

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang

Dalam Mendukung visi dan misi Walikota Kota Magelang, tujuan dan sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang Tahun 2023 mengacu kepada misi yang terkait dengan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi

dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Urusan Pilihan Bidang Perdagangan dan Urusan Pilihan Bidang Perindustrian masuk pada misi ke- 2 yaitu Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan Misi ke – 4 yaitu Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan peningkatan peran UMKM berbasis ekonomi kerakyatan.

Sedangkan Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang berdasarkan Misi ke – 2 dan Ke – 4 Walikota dan Wakil Walikota Kota Magelang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2

Tujuan Dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang Tahun 2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formula Hitung	Target pada tahun 2023
	Meningkatnya kontribusi sector ekonomi unggulan		Persentase kontribusi PDRB Sektor industri pengolahan	PDRB adalah jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan dari sektor industri pengolahan disuatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun .	PDRB Sektor industri pengolahan ---------- x 100% Total PDRB	16,15%
			Persentase kontribusi PDRB Sektor perdagangan	PDRB adalah jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan dari sektor perdangan disuatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun	PDRB sektor Perdagangan ---------- x 100% Total PDRB	13,66%
		Meningkatkan pemberdayaan industri melalui peningkatan nilai tambah produksi IKM	Prosentase pertumbuhan nilai produksi IKM	Nilai produksi adalah nilai dari komoditas yang dihasilkan oleh sektor produksi, biasanya merupakan hasil perkalian dari kuantitas produksi dengan harga	Nilai Produksi IKM tahun n - Nilai Produksi IKM tahun n - 1 ---------- x 100% Nilai Produksi IKM tahun n-1	3,40%
		Meningkatkan kinerja perdagangan daerah	Persentase pertumbuhan volume perdagangan daerah	Volume Perdagangan adalah jumlah nilai transaksi perdagangan disuatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun	Volume perdagangan daerah tahun n - dikurang volume perdagangan daerah tahun n-1 ---------- x 100% Volume perdagangan daerah tahun n-1	11,36%

	Meningkatnya daya beli masyarakat		Pengeluaran per kapita yang disesuaikan	Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah	BPS	12.705.000
		Pengendalian dan pengawasan Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harga dan stoknya stabil	Barang kebutuhan Pokok terdiri dari : Barang kebutuhan pokok hasil pertanian, Barang kebutuhan pokok hasil industry, Bahan kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan, dan Barang Penting Barang kebutuhan pokok hasil pertanian : beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, cabe, dan barang merah. Barang kebutuhan pokok hasil industry : gula, minyak goreng, dan tepung terigu. Bahan kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan : daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang. Barang Penting : Benih yaitu benih padi, jagung, kedelai. Pupuk. Gas elpiji 3 kilogram. Triplek. Semen. Besi baja konstruksi. Baja ringan.	Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harga dan stoknya stabil ---------- x 100% Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting	62,50%

	Meningkatnya pertumbuhan industri kreatif dan usaha mikro		Persentase pertumbuhan UMKM	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil	Jumlah UMKM tahun n - jumlah UMKM tahun n-1 ---------- x 100% Jumlah UMKM tahun n-1	4,50%
		Meningkatkan daya saing usaha mikro	Persentase usaha mikro yang meningkat kapasitasnya	Usaha mikro yang meningkat kapasitasnya adalah Usaha Mikro yang telah mengikuti pelatihan kewirausahaan	Jumlah UMKM yang telah mengikuti pelatihan ---------- x 100% Jumlah UMKM yang ada	3,92%
		Pertumbuhan usaha koperasi	Peningkatan volume usaha koperasi	Volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan jasa pada suatu periode dalam jangka waktu tertentu biasanya 1 tahun	Total volume usaha koperasi dalam 1 tahun	50.215.000.000

	Terwujudnya birokrasi yang responsif , akuntabel dan inovatif		Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan OPD	Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan masyarakat menggunakan Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2017	Hasil survey tingkat kepuasan masyarakat	75%
		Terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP OPD	SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.	LHE Inspektorat	80

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang dalam mengimplementasikan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik menyusun program dan kegiatan untuk tahun 2023 serta merupakan perwujudan dari upaya untuk mendukung visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Magelang. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang pada tahun 2023 pada awalnya disusun sebanyak 14 program 20 kegiatan dan 52 sub kegiatan. Namun dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 dan Rasionalisasi Anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dilakukan beberapa penyesuaian menjadi 11 program 17 kegiatan 48 sub kegiatan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**1.635.725.320**				**975.000.000**
2	**17**	**003**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Prosentase koperasi aktif yang patuh terhadap perundang undangan		41,97%	**20.376.000**				**12.500.000**
2	**17**	**003**	2.01		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase koperasi . KSP , USP koperasi yan mendapat pemeriksaan dan pengawasan		12,44%	**20.376.000**				**12.500.000**
2	17	003	2.01	001	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Magelang	5 Unit Usaha	10.323.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit Usaha	0
2	17	003	2.01	002	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang memenuhi peraturan perundang - undangan kewenangan kab / kota	Kota Magelang	15 Unit Usaha	10.053.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Unit Usaha	12.500.000

2	**17**	**005**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Prosentase SDM pengelola Koperasi yang meningkat kapasitasnya		18,84%	**103.274.000**				**110.000.000**
2	**17**	**005**	2.01		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Prosentase koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kab/kota		42%	**103.274.000**				**110.000.000**
2	17	005	2.01	001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kota Magelang	60 Orang	103.274.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		60 Orang	110.000.000
2	**17**	**006**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	persentase koperasi berkualitas *)		40%	**0**				**17.500.000**
2	**17**	**006**	2.01		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Prosentase koperasi yang telah diterbitkan sertifikat NIKnya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab / kota		52%	**0**				**17.500.000**
2	17	006	2.01	001	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberi dukungan fasilitasi penerbitan NIK	Kota Magelang	50 koperasi	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Unit Usaha	17.500.000
2	**17**	**007**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Persentase wirausaha pemula yang diberdayakan		20%	**1.137.075.320**				**835.000.000**
2	**17**	**007**	2.01		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	Prosentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam online data system (ODS)		3,70%	**1.137.075.320**				**835.000.000**
2	17	007	2.01	001	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah dokumen pendataan usaha mikro terkait dengan potensi dan pengembangannya	Kota Magelang	1 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	90.000.000

2	17	007	2.01	004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	Kota Magelang	2160 umkm	442.808.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rodanya Masbagya Bagaimana seseorang tidak hanya dilatih tetapi menjadi seorang yang mahir dalam menjalankan wirausaha (Konblik) Informasi terkait proses pengurusan izin belum sampai ke masyarakat (FGD) Bagaimana seseorang tidak hanya dilatih tetapi menjadi seorang yang mahir dalam menjalankan wirausaha (Konblik) Perlu dilakukan Monitoring dan Evaluasi pasca pelatihan (FGD)	2000 Unit Usaha	615.000.000
2	17	007	2.01	006	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	Kota Magelang	120 Orang	694.267.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Usulan Pokir anggota DPRD Kota Magelang	120 Orang	130.000.000
2	**17**	**008**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Prosentase peningkatan omzet pelaku usaha mikro		-2%	**375.000.000**				**0**
2	**17**	**008**	2.01		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha		4,50%	**375.000.000**				**0**
2	17	008	2.01	001	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan , pemasaran , SDM serta design dan teknologi	Kota Magelang	82 Unit Usaha	375.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Usulan Pokir anggota DPRD Kota Magelang	82 Unit Usaha	0

3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**								
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**4.629.178.913**				**6.148.500.000**
3	**30**	**003**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik		45%	**3.828.392.133**				**4.880.000.000**
3	**30**	**003**	2.01		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya		100%	**3.048.275.133**				**4.000.000.000**
3	30	003	2.01	001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Magelang	1 Unit	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melakukan terobosan tentang pasar di Kota Magelang agar lebih nyaman dan menarik (FGD)	1 Unit	250.000.000
3	30	003	2.01	002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Magelang	5 Unit	2.948.275.133	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	3.750.000.000
3	**30**	**003**	2.02		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang meningkat kapasitasnya		30%	**780.117.000**				**880.000.000**
3	30	003	2.02	001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Magelang	6 Dokumen	780.117.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Usulan Pokir anggota DPRD Kota Magelang dan mengakomodir usulan masyarakat (Rodanya masbagya) Banyak kuliner di Kota Magelang yang sepi hingga saat ini, terdampak dari pandemi (FGD) pengembangan tempat kuliner untuk peningkatan penghasilan masyarakat (Konblik)	6 Dokumen	800.000.000
3	30	003	2.02	002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Magelang	3 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rasionalisasi anggaran	3 Dokumen	80.000.000

3	**30**	**004**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok		< 8	**68.034.000**				**75.000.000**
3	**30**	**004**	2.02		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	Persentase update harga barang kebutuhan pokok dan barang penting masyarakat dalam 1 tahun		65,57%	**68.034.000**				**75.000.000**
3	30	004	2.02	001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Magelang	12 Laporan	68.034.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	75.000.000
3	**30**	**005**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	nilai ekspor (US$)		US$2.289.000	**557.736.000**				**1.008.500.000**
3	**30**	**005**	2.01		**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase peningkatan nilai arus barang ke luar daerah		10%	**557.736.000**				**1.008.500.000**
						Persentase peningkatan nilai arus barang ke luar negeri		2,50%					
3	30	005	2.01	001	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	Kota Magelang	12 Pelaku Usaha	7.736.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Pelaku Usaha	8.500.000
3	30	005	2.01	002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Pelaku Usaha	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kebijakan Pimpinan untuk diperbanyak pameran lokal	12 Pelaku Usaha	300.000.000
3	30	005	2.01	003	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Kota Magelang	12 Pelaku Usaha	550.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perlu dirancang adanya event yang bisa menjadi pasar bagi pelaku usaha dan pelaku seni tapi tetap memperhatikan prokes dan kebijakan pemerintah terkait PPKM (FGD)	12 Pelaku Usaha	700.000.000

3	**30**	**006**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda sah yang berlaku		74,64%	**175.016.780**				**185.000.000**
3	**30**	**006**	2.01		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan		71%	**175.016.780**				**185.000.000**
3	30	006	2.01	001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kota Magelang	3300 Unit	164.327.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3300 Unit	165.000.000
3	30	006	2.01	002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Kota Magelang	200 Orang	10.689.780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		200 Orang	20.000.000
3	**31**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	persentase terlaksananya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi capaian kinerja sesuai dengan peraturan perundangan - undangan yang berlaku		94%	**10.823.116.173**				**12.696.700.000**
3	**31**	**001**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	persentase ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD		90%	**56.837.000**				**19.000.000**
3	31	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Magelang	2 Dokumen	2.414.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	6.000.000
3	31	001	2.01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Kota Magelang	1 Dokumen	742.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		1 Dokumen	1.500.000
3	31	001	2.01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Magelang	1 Dokumen	785.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	1.250.000
3	31	001	2.01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Magelang	1 Dokumen	707.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2.000.000
3	31	001	2.01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Magelang	1 Dokumen	769.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	1.750.000

3	31	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Magelang	4 Laporan	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		16 Laporan	6.500.000
3	31	001	2.01	006	koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan	Kota Magelang	16 Laporan	48.920.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
3	**31**	**001**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	persentase ketersediaan (CK) dokumen pengelolaan keungan PD		90%	**9.297.115.789**				**11.067.500.000**
3	31	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kota Magelang	70 orang	9.244.588.877	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		70 orang	11.000.000.000
3	31	001	2.02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Magelang	1200 Dokumen	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1200 Dokumen	2.500.000
3	31	001	2.02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Kota Magelang	1 Laporan	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	1.750.000
3	31	001	2.02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kota Magelang	1 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rasionalisasi anggaran	1 Dokumen	2.000.000
3	31	001	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	Kota Magelang	13 Laporan	50.026.912	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 Laporan	60.000.000
3	31	001	2.02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Magelang	1 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rasionalisasi anggaran	1 Dokumen	1.250.000
3	**31**	**001**	2.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	persentase laporan (CL) administrasi pendapatan		90%	**4.427.000**				**5.500.000**
3	31	001	2.04	007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		12 Dokumen	4.427.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	5.500.000
3	**31**	**001**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	persentase pelayanan administrasi umum		90%	**159.092.000**				**208.000.000**

3	31	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Magelang	1 Paket	7.705.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	9.000.000
3	31	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Magelang	2 Paket	23.890.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	30.000.000
3	31	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Magelang	1 Paket	18.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	30.000.000
3	31	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Magelang	3 Dokumen	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	6.000.000
3	31	001	2.06	007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Magelang	1 Paket	17.357.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	20.000.000
3	31	001	2.06	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Magelang	10 Laporan	5.940.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Laporan	8.000.000
3	31	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Magelang	23 Laporan	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		23 Laporan	105.000.000
3	**31**	**001**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	95%	95%	**870.275.384**				**887.200.000**
3	31	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Magelang	12 Laporan	1.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	2.200.000
3	31	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Magelang	12 Laporan	580.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	585.000.000
3	31	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Magelang	12 Laporan	288.375.384	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	300.000.000
3	**31**	**001**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	persentase pemelihharaan barang milik daerah		80%	**435.369.000**				**509.500.000**
3	31	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Magelang	1 Unit	25.290.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	30.000.000

3	31	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Magelang	70 Unit	348.079.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		70 Unit	390.000.000
3	31	001	2.09	005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Magelang	3 Unit	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	3.500.000
3	31	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Magelang	36 Unit	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 Unit	30.000.000
3	31	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Magelang	3 Unit	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	56.000.000
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				**2.532.665.100**				
3	**31**	**002**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase pertambahan jumlah industri kecil dan menengah		1,47%	**2.452.665.100**				**3.245.000.000**
3	**31**	**002**	2.01		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri yang ditetapkan dalam RPIK		84,00%	**2.452.665.100**				**3.245.000.000**
3	31	002	2.01	003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kota Magelang	2 Dokumen	489.874.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Usulan Pokir anggota DPRD Kota Magelang,Musrenbang dan usulan masyarakat (Rodanya masbagya)	2 Dokumen	475.000.000
											Produk-produk UMKM sebaiknya mulai difikirkan untuk bisa merambah pangsa pasar di luar Kota Magelang agar lebih maju lagi (FGD)		
3	31	002	2.01	004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kota Magelang	1 Dokumen	992.385.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	1.800.000.000

3	31	002	2.01	005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kota Magelang	1 Dokumen	855.858.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Diharapkan hasil-hasil riset dari Perguruan Tinggi bisa dimanfaatkan untuk bekerja sama dengan Pemerintah Kota Magelang (FGD)	1 Dokumen	850.000.000
3	31	002	2.01	006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kota Magelang	2 Dokumen	114.548.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masih ada pabrik tahu yang terdapat di daerah tidar dudan yang masih membuang limbah ke sungai dan ini menyebabkan pencemaran air. Oleh karena itu mohon untuk dapat dibuatkan IPAL seperti halnya yang ada di Tidar Campur (FGD).	2 Dokumen	120.000.000
3	**31**	**003**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	Persentase jumlah hasil pemantauan dan		75%	**0**				**45.000.000**
3	**31**	**003**	2.01		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase jumlah IKM yang memiliki legalitas usaha		0,75%	**0**				**45.000.000**
						Persentase penerbitan rekomendasi hasil verifikasi teknis pengajuan izin usaha industri		100%					
3	31	003	2.01	001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Kota Magelang	1 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rasionalisasi anggaran	1 Dokumen	45.000.000

3	**31**	**004**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Ketersediaan informasi industri terkini dan lengkap		90%	**80.000.000**				**100.000.000**
3	**31**	**004**	2.01		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase data perusahaan industri kecil dan menengah yang masuk dalam Siinas		0,95%	**80.000.000**				**100.000.000**
3	31	004	2.01	001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui	Kota Magelang	1 Dokumen	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	100.000.000
TOTAL									**19.620.685.506**				**23.210.200.000**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Setelah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) maka disusunlah Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang tahun 2023. Renja disusun untuk memudahkan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang pada tahun 2023. Renja ini dibuat sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang tahun 2023.

Pendanaan program dan kegiatan didasarkan pada program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Tahun 2022 dan perkiraan tahun 2024, maka ditetapkan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang berdasarkan Indikator kerja dan sasaran kerja yang dijabarkan dalam pencapaian Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang berdasarkan pagu indikatif.

Berikut merupakan tabel yang menggambarkan rencana kerja dan pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang pada tahun 2023 dan telah dijabarkan pula ke dalam target dan pagu indikatif per triwulan:

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Kode					Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2023										Kinerja Renja Tahun 2024	
							Tahunan		Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
							Target	Pagu indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			**1.635.725.320**		**167.433.030**		**419.052.230**		**899.444.030**		**149.796.030**		**975.000.000**
2	**17**	**003**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Prosentase koperasi aktif yang patuh terhadap perundang undangan	41,97%	**20.376.000**		**5.094.000**		**5.094.000**		**5.094.000**		**5.094.000**		**12.500.000**
2	**17**	**003**	2.01		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase koperasi . KSP , USP koperasi yan mendapat pemeriksaan dan pengawasan	12,44%	**20.376.000**		**5.094.000**		**5.094.000**		**5.094.000**		**5.094.000**		**12.500.000**
2	17	003	2.01	001	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Unit Usaha	10.323.000	5 unit usaha	2.580.750	5 unit usaha	2.580.750	5 unit usaha	2.580.750	5 unit usaha	2.580.750	5 Unit Usaha (20 Unit Usaha)	0
2	17	003	2.01	002	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang memenuhi peraturan perundang - undangan kewenangan kab / kota	15 Unit Usaha	10.053.000	8 unit usaha	2.513.250	0 unit usaha	2.513.250	7 unit usaha	2.513.250	0 usaha	2.513.250	15 Unit Usaha (30 Unit Usaha)	12.500.000
2	**17**	**005**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Prosentase SDM pengelola Koperasi yang meningkat kapasitasnya	18,84%	**103.274.000**		**51.637.000**		**51.637.000**		**0**		**0**		**110.000.000**
2	**17**	**005**	2.01		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Prosentase koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kab/kota	42%	**103.274.000**		**51.637.000**		**51.637.000**		**0**		**0**		**110.000.000**
2	17	005	2.01	001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	60 Orang	103.274.000	30 orang	51.637.000	30 orang	51.637.000	-	-	-	-	60 Orang	110.000.000
2	**17**	**006**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	persentase koperasi berkualitas *)	40%	**0**										**17.500.000**
2	**17**	**006**	2.01		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Prosentase koperasi yang telah diterbitkan sertifikat NIKnya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab / kota	52%	**0**										**17.500.000**
2	17	006	2.01	001	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberi dukungan fasilitasi penerbitan NIK	50 koperasi	0									50 Unit Usaha	17.500.000
2	**17**	**007**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Persentase wirausaha pemula yang diberdayakan	20%	**1.137.075.320**		**110.702.030**		**362.321.230**		**519.350.030**		**144.702.030**		**835.000.000**
2	**17**	**007**	2.01		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	Prosentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam online data system (ODS)	3,70%	**1.137.075.320**		**110.702.030**		**362.321.230**		**519.350.030**		**144.702.030**		**835.000.000**
2	17	007	2.01	001	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah dokumen pendataan usaha mikro terkait dengan potensi dan pengembangannya	1 Dokumen	0									1 Dokumen	90.000.000
2	17	007	2.01	004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	2160 umkm	442.808.120	500 unit usaha	110.702.030	500 unit usaha	110.702.030	500 unit usaha	110.702.030	500 unit usaha	110.702.030	2000 Unit Usaha	615.000.000
2	17	007	2.01	006	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	120 Orang	694.267.200	-	-	45 orang	251.619.200	45 orang	408.648.000	30 orang	34.000.000	120 Orang	130.000.000

2	**17**	**008**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Prosentase peningkatan omzet pelaku usaha mikro	-2%	**375.000.000**		**0**		**0**		**375.000.000**		**0**		**0**
2	**17**	**008**	2.01		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha	4,50%	**375.000.000**		**0**		**0**		**375.000.000**		**0**		**0**
2	17	008	2.01	001	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan , pemasaran , SDM serta design dan teknologi	82 Unit Usaha	375.000.000	-	-	-	-	82 unit usaha	375.000.000	-	-	82 Unit Usaha	0
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			**4.629.178.913**		**831.550.033**		**922.082.033**		**1.452.711.783**		**1.422.835.063**		**6.148.500.000**
3	**30**	**003**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik	45%	**3.828.392.133**		**773.459.783**		**858.991.783**		**836.885.533**		**1.359.055.033**		**4.880.000.000**
3	**30**	**003**	2.01		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100%	**3.048.275.133**		**737.068.783**		**837.068.783**		**737.068.783**		**737.068.783**		**4.000.000.000**
3	30	003	2.01	001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	100.000.000	-	-	1 unit	100.000.000	-	-	-	-	1 Unit	250.000.000
3	30	003	2.01	002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5 Unit	2.948.275.133	5 unit	737.068.783	5 unit	737.068.783	5 unit	737.068.783	5 unit	737.068.783	5 Unit	3.750.000.000
3	**30**	**003**	2.02		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang meningkat kapasitasnya	30%	**780.117.000**		**36.391.000**		**21.923.000**		**99.816.750**		**621.986.250**		**880.000.000**
3	30	003	2.02	001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	6 Dokumen	780.117.000	2 dokumen	36.391.000	1 dokumen	21.923.000	2 dokumen	99.816.750	1 dokumen	621.986.250	6 Dokumen	800.000.000
3	30	003	2.02	002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	-	-									3 Dokumen	80.000.000
3	**30**	**004**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	<8	68.034.000		17.008.500		17.008.500		17.008.500		17.008.500		**75.000.000**
3	**30**	**004**	2.02		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	Persentase update harga barang kebutuhan pokok dan barang penting masyarakat dalam 1 tahun	65,57%	**68.034.000**		**17.008.500**		**17.008.500**		**17.008.500**		**17.008.500**		**75.000.000**
3	30	004	2.02	001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	68.034.000	3	17.008.500	3	17.008.500	3	17.008.500	3	17.008.500	12 Laporan	75.000.000
3	**30**	**005**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	nilai ekspor (US$)	US$2.289.000	557.736.000		-		-		557.736.000		-		**1.008.500.000**
3	**30**	**005**	2.01		**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase peningkatan nilai arus barang ke luar daerah	10%	**557.736.000**		**-**		**-**		**557.736.000**		**-**		**1.008.500.000**
						Persentase peningkatan nilai arus barang ke luar negeri	2,50%											
3	30	005	2.01	001	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	12 unit usaha	7.736.000	-	-	-	-	12	7.736.000	-	-	12 Pelaku Usaha	8.500.000
3	30	005	2.01	002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	12 unit usaha	-									12 Pelaku Usaha	300.000.000
3	30	005	2.01	003	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	12 unit usaha	550.000.000					12	550.000.000			12 Pelaku Usaha	700.000.000
3	**30**	**006**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda sah yang berlaku	74,64%	**175.016.780**		**41.081.750**		**46.081.750**		**41.081.750**		**46.771.530**		**185.000.000**
3	**30**	**006**	2.01		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	71%	**175.016.780**		**41.081.750**		**46.081.750**		**41.081.750**		**46.771.530**		**185.000.000**
3	30	006	2.01	001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	3300 Unit	164.327.000	825	41.081.750	825	41.081.750	825	41.081.750	825	41.081.750	3300 Unit	165.000.000
3	30	006	2.01	002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	200 Orang	10.689.780	-	-	100	5.000.000	-	-	100	5.689.780	200 Orang	20.000.000

3	**31**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	persentase terlaksananya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi capaian kinerja sesuai dengan peraturan perundangan - undangan yang berlaku	94%	**10.823.116.173**		**2.591.110.614**		**2.606.514.170**		**2.617.031.167**		**2.594.626.219**		**12.696.700.000**
3	**31**	**001**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	persentase ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	90%	**56.837.000**		**2.500.000**		**1.414.000**		**3.296.000**		**707.000**		**19.000.000**
3	31	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.414.000	-	-	1	1.414.000	1	1.000.000	-	-	2 Dokumen	6.000.000
3	31	001	2.01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	742.000	-	-	-	-	1	742.000	-	-	1 Dokumen	1.500.000
3	31	001	2.01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	785.000	-	-	-	-	1	785.000	-	-	1 Dokumen	1.250.000
3	31	001	2.01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	707.000	-	-	-	-	-	-	1	707.000	1 Dokumen	2.000.000
3	31	001	2.01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	769.000					1	769.000	-	-	1 Dokumen	1.750.000
3	31	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2.500.000	4	2.500.000							4 laporan	6.500.000
3	31	001	2.01	006	koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	16 Laporan	48.920.000	3		3		3		3			
3	**31**	**001**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	persentase ketersediaan (CK) dokumen pengelolaan keungan PD	90%	**9.297.115.789**		**2.325.403.948**		**2.323.903.947**		**2.323.903.947**		**2.323.903.947**		**11.067.500.000**
3	31	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	70 orang	9.244.588.877	70	2.311.147.220	70	2.311.147.219	70	2.311.147.219	70	2.311.147.219		11.000.000.000
3	31	001	2.02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1200 Dokumen	1.000.000	300	250.000	300	250.000	300	250.000	300	250.000	1200 Dokumen	2.500.000
3	31	001	2.02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.500.000	1	1.500.000	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	1.750.000
3	31	001	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	50.026.912	3	12.506.728	3	12.506.728	4	12.506.728	3	12.506.728	13 Laporan	60.000.000
3	**31**	**001**	2.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	persentase laporan (CL) administrasi pendapatan kewenangan PD	90%	**4.427.000**		**500.000**		**1.500.000**		**1.500.000**		**927.000**		**5.500.000**
3	31	001	2.04	007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	4.427.000	3	500.000	3	1.500.000	3	1.500.000	3	927.000	12 Dokumen	5.500.000
3	**31**	**001**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	persentase pelayanan administrasi umum	90%	**159.092.000**		**40.195.000**		**20.710.000**		**40.195.000**		**39.857.000**		**208.000.000**
3	31	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	7.705.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	1.705.000	1 Paket	9.000.000
3	31	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	23.890.000	3	6.360.000	3	4.810.000	3	6.360.000	3	6.360.000	2 Paket	30.000.000
3	31	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	18.200.000	1	4.550.000	1	4.550.000	1	4.550.000	1	4.550.000	1 Paket	30.000.000
3	31	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	6.000.000	3	1.500.000	3	1.500.000	3	1.500.000	3	1.500.000	3 Dokumen	6.000.000

3	31	001	2.06	007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	17.357.000	3	4.350.000	3	4.350.000	3	4.350.000	3	4.307.000	1 Paket	20.000.000
3	31	001	2.06	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	5.940.000	3	1.485.000	3	1.485.000	3	1.485.000	3	1.485.000	10 Laporan	8.000.000
3	31	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	80.000.000	3	19.950.000	3	2.015.000	3	19.950.000	3	19.950.000	23 Laporan	105.000.000
3	**31**	**001**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	95%	**870.275.384**		**204.739.166**		**231.313.723**		**230.363.720**		**203.858.772**		**887.200.000**
3	31	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1.900.000	2	950.000	2	950.000					12 Laporan	2.200.000
3	31	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	580.000.000	3	145.000.000	3	145.000.000	3	145.000.000	3	145.000.000	12 Laporan	585.000.000
3	31	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	288.375.384	3	58.789.166	3	85.363.723	3	85.363.720	3	58.858.772	12 Laporan	300.000.000
3	**31**	**001**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	persentase pemelihharaan barang milik daerah	80%	**435.369.000**		**17.772.500**		**27.672.500**		**17.772.500**		**25.372.500**		**509.500.000**
3	31	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	25.290.000	1	2.772.500	1	10.672.500	1	2.772.500	1	10.372.500	1 Unit	30.000.000
3	31	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	70 Unit	348.079.000									70 Unit	390.000.000
3	31	001	2.09	005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	2.000.000			3	2.000.000					3 Unit	3.500.000
3	31	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	20.000.000	9	5.000.000	9	5.000.000	9	5.000.000	9	5.000.000	36 Unit	30.000.000
3	31	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	40.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3 Unit	56.000.000
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDSUTRIAN			**2.532.665.100**		**1.520.000**		**832.613.033**		**817.555.033**		**880.977.033**		
3	**31**	**002**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	1,47%	**2.452.665.100**		**0**		**817.555.033**		**817.555.033**		**817.555.033**		**3.245.000.000**
3	**31**	**002**	2.01		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri yang ditetapkan dalam RPIK	84,00%	**2.452.665.100**		**0**		**817.555.033**		**817.555.033**		**817.555.033**		**3.245.000.000**
3	31	002	2.01	003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	9 dokumen	489.874.000			3 dokumen	163.291.333	3 dokumen	163.291.333	3 dokumen	163.291.333	2 Dokumen	475.000.000
3	31	002	2.01	004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3 dokumen	992.385.000			1 dokumen	330.795.000	1 dokumen	330.795.000	1 dokumen	330.795.000	1 Dokumen	1.800.000.000
3	31	002	2.01	005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 dokumen	855.858.100			1 dokumen	285.286.033	1 dokumen	285.286.033	2 dokumen	285.286.033	1 Dokumen	850.000.000
3	31	002	2.01	006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	2 Dokumen	114.548.000			-	38.182.667	1 laporan	38.182.667	1 laporan	38.182.667	2 Dokumen	120.000.000

3	**31**	**003**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	75%	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**45.000.000**
3	**31**	**003**	2.01		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase jumlah IKM yang memiliki legalitas usaha	0,75%	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**45.000.000**
						Persentase penerbitan rekomendasi hasil verifikasi teknis pengajuan izin usaha industri	100%											
3	31	003	2.01	001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 Dokumen	0									1 Dokumen	45.000.000
3	**31**	**004**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Ketersediaan informasi industri terkini dan lengkap	90%	**80.000.000**		**1.520.000**		**15.058.000**		**0**		**63.422.000**		**100.000.000**
3	**31**	**004**	2.01		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase data perusahaan industri kecil dan menengah yang masuk dalam Siinas	0,95%	**80.000.000**		**1.520.000**		**15.058.000**		**0**		**63.422.000**		**100.000.000**
3	31	004	2.01	001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	80.000.000	-	1.520.000	-	15.058.000	-	-	1 dokumen	63.422.000	1 Dokumen	100.000.000
TOTAL								**19.620.685.506**		**3.591.613.677**		**4.780.261.466**		**5.786.742.013**		**5.048.234.345**		**23.210.200.000**

BAB V

PENUTUP

Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu Renja juga berfungsi untuk meninjau kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang tahun 2022 - 2026 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang tahun 2023.

Penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang sebagai upaya mendukung visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Magelang. Pelaksaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Kota Magelang maupun di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Renja Tahun 2023 ini serta dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi unggulan dan Meningkatnya daya beli masyarakat di Kota Magelang.

Magelang , Juli 2022

Plt.KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA MAGELANG
Sekretaris

Syaifullah, S.Sos., Msi
Pembina Tk. I
NIP. 19680403 199503 1 003